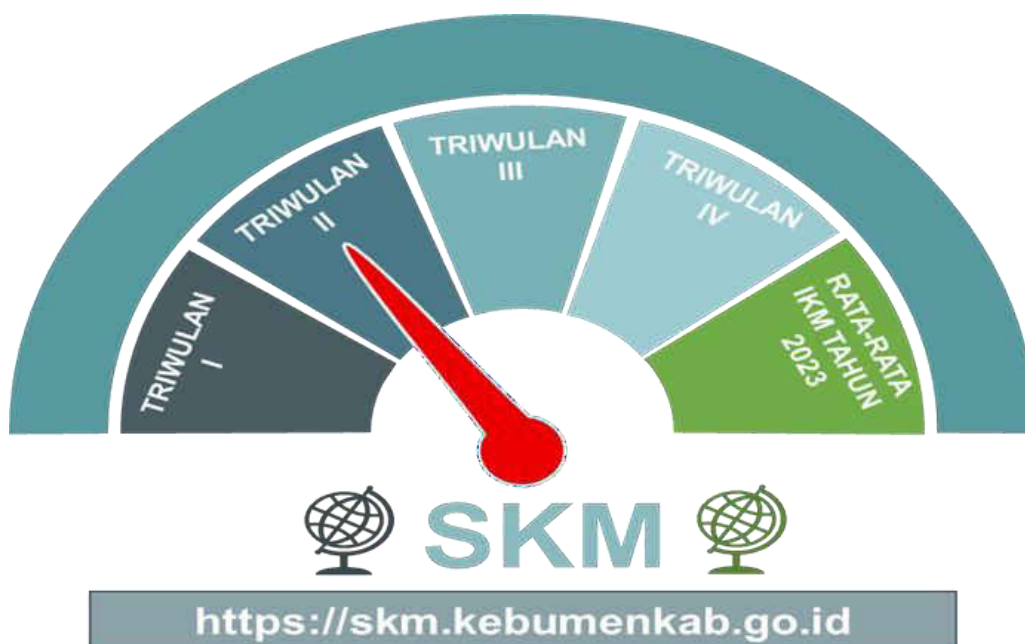


Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kebumen

Pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima



LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. Laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini menyampaikan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan public yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Melalui hasil survey yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2025, diharapkan memberikan gambaran capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik di Dinas PMD Kabupaten Kebumen. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Kebumen, 8 April 2025

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kebumen

COKRO AMINOTO, S.IP,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 198702 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. Laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini menyampaikan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan public yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Melalui hasil survey yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2025, diharapkan memberikan gambaran capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik di Dinas PMD Kabupaten Kebumen. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Kebumen, 8 April 2025

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kebumen



COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 198702 1 004

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Survey Kepuasan Masyarakat	5
BAB II	
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT	7
2.1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025	8
BAB III	
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT	13
3.1. Realisasi Rencana Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025	11
BAB IV	
KESIMPULAN.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 terkait Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap warga negara dan penduduk baik barang, jasa, dan atau pelayanan administratif.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh yang langsung dirasakan oleh desa dan stakeholder terkait, sehingga mendapatkan hasil evaluasi dan kemudian diolah serta dibuat laporan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan publik selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan. Tindak lanjut dari survei tersebut adalah usaha untuk terus mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Dinas PMD Kabupaten Kebumen telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Desa baik dalam bentuk pelayanan berupa pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah Desa, maupun yang berkaitan dengan pembinaan administrasi desa serta pembinaan atas kelembagaan serta Bumdesa/Bumdesma di Kecamatan dan Desa. Dengan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sejumlah 41 Subkegiatan baim yang bersumber dari DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun sumber dana APBdesa.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Dasar hukum kegiatan seluruh proses pelaksanaan pelatihan mulai dari perencanaan sampai dengan survei diatur dalam peraturan berikut:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Misteri Shopping Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sasaran dilakukannya Survey Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan Survey maka akan dapat diperoleh manfaat antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat Tahun 2025 oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen per Triwulan dalam setahun melalui sistem aplikasi SKM online dengan akses ke alamat link <https://skm.kebumenkab.go.id> mendasari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/274 Tanggal 04 Maret 2021 hal Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara Elektronik per triwulan dalam setahun.

Guna mengetahui mutu layanan dan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai
Interval Konversi, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber data : Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017

2.1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Ringkasan Hasil SKM Triwulan I Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	93.49	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	91.93	A
3	Waktu Penyelesaian	84.35	B
4	Biaya/Tarif	98.7	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	87.36	B
6	Kompetensi Pelaksana	90.89	A
7	Perilaku Pelaksana	91.03	A
8	Sarana dan Prasarana	90.01	A
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	91.11	A

Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Waktu Penyelesaian	84.35	B
	a. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
	b. Proses Pengelolaan Aset Desa		
	c. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga		

	dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)		
2	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	87.36	B
	a. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
	b. Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)		
	c. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
3	Sarana dan Prasarana	90.01	A
	a. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
	b. Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)		
	c. Proses Pengelolaan Aset Desa		

Dari data pada tabel di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2025

No.	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu (Minggu-Bulan Tahun 2025)												Penanggung Jawab
			Januari				Februari				Maret				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Waktu Penyelesaian	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG I
		Proses Pengelolaan Aset Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG II
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG III
2	Produk, Spesifikasi , dan Jenis Pelayanan	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG I
		Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG II

		Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG III
3	Sarana dan Prasarana	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG I
		Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG II
		Proses Pengelolaan Aset Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BIDANG III

Sumber data : Pengolah Data SKM Tahun 2025

BAB III **REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

3.1. Realisasi Rencana Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1
Realisasi Rencana Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025

No.	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/ Hambatan
1	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Sudah di laksanakan	Melakukan pendampingan kepada Desa dalam implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Proses Pergantian Pemimpin /Bupati dalam proses persetujuan rekomendasi
	Proses Pengelolaan Aset Desa	Sudah di laksanakan	Melakukan pendampingan kepada Desa dalam implementasi Aset Desa		

	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	Sudah di laksanakan	Melakukan pendampingan kepada Desa dalam implementasi TMMD dan KBM		Proses verifikasi administratif penatausahaan keuangan (LS) cukup memakan waktu.
2	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Sudah di laksanakan	Melakukan pendampingan kepada Desa dalam implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Proses Pergantian Pemimpin /Bupati
	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	Sudah di laksanakan	Melakukan pendampingan kepada Desa dalam implementasi proses pengajuan pencairan Dana Desa (DD)		Kurangnya Verifikasi dan Pengecakan dokumen di tingkat Kecamatan.

	Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Sudah di laksanakan	Telah dilaksanakan pelantikan Posyandu		Proses Pergantian Pemimpin /Bupati Dan menunggu pelaksanaan pengukuhan propinsi
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Sudah di laksanakan	Melakukan pendampingan kepada Desa dalam implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Proses Pergantian Pemimpin /Bupati
	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	Sudah di laksanakan			Kurangnya Verifikasi dan Pengecakan dokumen di tingkat Kecamatan.

	Proses Pengelolaan Aset Desa	Sudah di laksanakan	Melakukan pendampingan kepada Desa dalam implementasi Aset Desa		
--	------------------------------	---------------------	---	---	--

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 100 %
2. Tidak ada rencana tindak lanjut tambahan.
3. Guna memastikan rencana tindak lanjut tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya rencana tindak lanjut antara lain:

No	Rencana Tindak Lanjut	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1.	Menjadikan hasil SKM sebagai acuan/pedoman periodik agar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas PMD menjadi semakin baik.	Perbaikan berkelanjutan sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi hasil survey kepuasan masyarakat 1) Penyampaian hasil evaluasi di setiap rapat. 2) Penyampaian rencana kegiatan tindak lanjut kepada bidang yang	April 2025	Sekretaris Dinas	• Desa • Kecamatan • OPD Terkait

		berkaitan.			
--	--	------------	--	--	--

Demikian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. Pada Triwulan I Tahun 2025. Sebagai upaya untuk mengetahui tingkat Kinerja Pelayanan serta sebagai pedoman dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat pada waktu yang akan datang.

Kebumen, April 2025
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen

COKRO AMINOTO, S.IP,M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19661129 198702 1 004

		berkaitan.			
--	--	------------	--	--	--

Demikian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. Pada Triwulan I Tahun 2025. Sebagai upaya untuk mengetahui tingkat Kinerja Pelayanan serta sebagai pedoman dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat pada waktu yang akan datang.

Kebumen, April 2025

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen



COKRO AMINOTO, S.IP,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 198702 1 004

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

UNIT PELAYANAN PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2025

<u>NILAI IKM</u>	<u>RESPONDEN</u>
90.08	Jumlah Responden : 63 orang Jenis Kelamin : Laki-laki = 36 orang : Perempuan = 27 orang Pendidikan : SD = 0 orang : SMP = 1 orang : SMA = 26 orang : DIPLOMA = 10 orang : S1 = 24 orang : S2/S3 = 2 orang : Lainnya = 0 orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI AGAR TERUS

MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

**Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan
Pada Unit Penyelenggara Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Triwulan 1 Tahun 2025**

No	Nama Layanan	Jumlah Responden	Unsur Pelayanan									Indeks Kepuasan Masyarakat
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	3	100	100	100	100	100	100	100	91.67	100	98.08
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	1	100	100	75	100	75	100	100	100	100	93.5
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	75	75	75	100	75	75	75	75	75	77
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	1	100	100	75	100	100	100	100	100	100	96.25
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	5	95	75	75	95	60	75	75	75	95	79.2
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	7	100	100	75	100	75	75	100	100	100	90.75
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	1	100	100	75	100	100	100	75	75	25	82.5
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	25	91	85	83	93	86	87	89	83	93	86.9
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	2	75	87.5	75	100	87.5	87.5	87.5	87.5	100	86.63
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3	91.67	83.33	91.67	100	83.33	91.67	91.67	91.67	100	90.75
17	Pelayanan Musyawarah Desa	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	4	81.25	81.25	81.25	93.75	81.25	81.25	81.25	81.25	87.5	82.5

No	Nama Layanan	Jumlah Responden	Unsur Pelayanan									Indeks Kepuasan Masyarakat
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jumlah		63	93.49	91.93	84.35	98.7	87.36	90.89	91.03	90.01	91.11	90.08

**Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 1 Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan**

No	Nama Layanan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Lainnya	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	0	0	2	1	0	0	0	3
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	0	0	0	1	0	0	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0	0	1	1	0	2
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	0	0	0	0	1	0	0	1
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	1	0	1	0	0	2
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	0	0	4	1	0	0	0	5
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	0	0	4	0	1	0	0	5
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	0	0	0	7	0	0	0	7
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	0	0	1	0	0	0	0	1
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	0	0	10	1	13	1	0	25
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	1	0	1	0	0	2
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	1	0	2	0	0	3
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	0	2	0	0	0	0	2
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	1	0	0	3	0	0	4
Total Responden		0	1	26	10	24	2	0	63

**Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 1 Tahun 2025 Berdasarkan Usia**

No	Nama Layanan	<=20	20-29	30-39	40-49	>=50	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	2	0	1	0	0	3
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	0	0	1	0	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0	2	0	2
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	0	0	0	1	0	1
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	2	0	0	2
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	0	0	3	2	0	5
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	0	0	1	0	4	5
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0	0	0	0
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0	0	0	0
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	0	0	7	0	0	7
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	0	1	0	0	0	1
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	0	5	8	7	5	25
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	0	0	1	0	1	2
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	1	1	1	0	3
17	Pelayanan Musyawarah Desa	0	0	2	0	0	2
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	2	2	0	0	4
Total Responden		2	9	28	14	10	63

**Rekapitulasi Responden SKM Unit Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Triwulan 1 Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Layanan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa	1	2	3
2	Penyusunan Dokumen RKPDesa dan RPJMDesa	0	1	1
3	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	2
4	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	1	0	1
5	Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	0	0	0
6	Proses Penyusunan Produk Hukum Desa	1	1	2
7	Proses Penyusunan Data Profil Desa	3	2	5
8	Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	4	1	5
9	Proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	0	0	0
10	Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	0	0	0
11	Proses Penyusunan APBDesa	0	0	0
12	Proses Pengoperasian aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) online	7	0	7
13	Proses Pengelolaan Aset Desa	1	0	1
14	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa	11	14	25
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota (TMMD, KBM)	2	0	2
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	2	3
17	Pelayanan Musyawarah Desa	2	0	2
18	Pengembangan Kawasan Perdesaan	1	3	4
Total Responden		36	27	63